

**KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH :
DAMPAK DARI SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH**

Sri Dewi Anggadini

sri.dewi@email.unikom.ac.id

Departemen Akuntansi, Universitas Komputer Indonesia, Indonesia

Ari Bramasto

arya_bravo@yahoo.com

Departemen Akuntansi, Universitas Komputer Indonesia, Indonesia

Sulton Aulia

sultonaulia@mahasiswa.unikom.ac.id

Departemen Akuntansi, Universitas Komputer Indonesia, Indonesia

ABSTRAK

Tuntutan masyarakat semakin meningkat atas pemerintahan yang baik. Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus ditingkatkan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Di mana laporan keuangan yang dihasilkan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada BPKD Kabupaten Bandung Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah BPKD Kabupaten Bandung Barat dengan metode analisis Structural Equation Model (SEM) dengan menggunakan Smart PLS3.0 dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Populasi penelitian ini adalah pegawai BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan sample sebanyak 30. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ,
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tuntutan publik akan tata pemerintahan yang baik semakin meningkat. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus ditingkatkan. Laporan keuangan mencerminkan kemampuan untuk mengetahui apakah pemerintah berfungsi dengan baik, yang mengharuskan pemerintah untuk memberikan laporan keuangan yang berkualitas. Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi tentang anggaran riil, posisi keuangan, arus masuk / arus kas keluar, dan kinerja keuangan entitas pelapor yang berguna bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Meinarsih et al., 2020). Ketika laporan keuangan akhir memenuhi karakteristik kualitatif dari laporan keuangan yang relevan, dapat diandalkan, dapat diperbandingkan dan mudah dipahami (Wati et al., 2014).

Sistem pengendalian intern dalam laporan keuangan pemerintah daerah sangat penting dan harus kita perhatikan, agar tercapai efisiensi, kemanfaatan dan pencegahan kerugian keuangan nasional, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah. Sistem Pengendalian Internal merupakan proses integral dari tindakan dan aktivitas yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh karyawan untuk memberikan jaminan yang memadai bagi pencapaian tujuan organisasi (Sujana et al., 2020). Pengendalian internal sangat penting, karena sistem akuntansi sebagai sistem informasi adalah subjek dari kesalahan yang disengaja dan tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk meyakinkan pemangku kepentingan dan masyarakat tentang kebenaran laporan keuangan pemerintah, diperlukan sistem pengendalian internal yang optimal (Karmila et al., 2012).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan kumpulan dari subsistem-subsistem yang didalam setiap subsistem tersebut peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan dan mencatat data keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi berbagai laporan keuangan untuk pihak eksternal maupun internal pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah dalam satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas (Mahmudi, 2016). Laporan keuangan merupakan salah satu media bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. (Synthia, 2017)

Terdapat fenomena dimana laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih lemah, dalam hal ini berkaitan dengan salah satu indikator laporan keuangan yaitu dapat dibandingkan dimana seharusnya laporan keuangan dapat di bandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antarperusahaan untuk mnevaluasi posisi keuangan secara relatif. Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang dihasilkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sehingga laporan keuangan tersebut bisa dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain (Erlina et al., 2015). Pemerintah daerah sebagai

pengelola dana masyarakat harus mampu memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya sehingga dituntut memiliki pengelolaan yang handal (Rifad et al., 2010). Asep Sudiro, kepala aset di BPKD KBB, mengatakan masalah aset selalu menjadi kendala bagi pemerintah Bandung Barat sehingga sulit untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dalam menilai laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Lima tahun terakhir Bandung Barat harus puas dengan WDP. Kabupaten Bandung Barat masih memiliki ribuan aset yang belum bersertifikat. *Jabarexpres* (2018) Data BPKD Kabupaten Bandung Barat berasal dari 1.444 bidang dan pada 2017 baru 26 bidang yang memiliki sertifikat. Fenomena ini melanggar ruang lingkup kualitas laporan keuangan yang tidak relevan dalam arti tidak tepat waktu akibat masalah pengelolaan aset yang belum terselesaikan, tidak lengkap, dan tidak tuntas, karena masih terdapat aset yang belum bersertifikat serta yang tidak bisa diverifikasi, aset semacam itu tidak bisa diandalkan. Sedangkan pernyataan laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Asep Sudiro, 2019). Nursyabani (2019) Opini Wajar Tanpa Pengecualian gagal diraih akibat terganjal penggelapan dana Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan sebesar Rp 7,7 miliar di RSUD Lembang. Fenomena ini melanggar dari dimensi sistem pengendalian intern yaitu, pemantauan yang masih lemah dalam arti pimpinan masih kurang dalam melakukan pengawasan terhadap bawahannya (Aa Umbara Sutisna, 2019) dan (Sari, 2019)

1.2 Rumusan masalah

1. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bandung Barat.
2. Seberapa besar pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bandung Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggunakan data yang diperoleh dan pengujian empiris untuk mengetahui kebenaran pengaruh sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah. Tujuan Penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bandung Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian sudah selayaknya memiliki kegunaan, dalam penelitian ini hanya ada kegunaan akademis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang SPI dan SAKD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan diharapkan hasil penelitian bisa bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Sistem Pengendalian Intern menurut Puspitawati & Anggadini (2011) :
"Sistem pengendalian intern adalah proses yang dilakukan oleh komite, manajemen, dan personel entitas lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan yang memadai untuk mencapai tiga jenis tujuan berikut, yaitu: a) keandalan laporan keuangan, b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan c) Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku". Widyaningsih (2016) Pengendalian internal merupakan proses integral dari tindakan dan aktivitas berkelanjutan dari para pemimpin dan staf untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi dalam efektivitas dan efisiensi operasional, pelaporan keuangan yang andal, keamanan aset negara dan kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan kebijakan yang dijalankan secara menyeluruh sebuah unit pendidikan. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Pasal 232 ayat (3) Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 dalam Halim & Kusufi (2012) mengatakan bahwa "Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset". Selanjutnya, menurut Saerang et al. (2019) Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) yang memadai tidak hanya dapat berfungsi untuk verifikasi transaksi sehingga dana dapat dilacak sesuai dengan tujuannya, dan memeriksa kewenangan, efisiensi, dan validitas dana pembelajaran, tetapi sistem akuntansi keuangan daerah juga dapat mendukung pencapaian kinerja pemerintah daerah

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menurut Puspitawati & Anggadini, (2011) laporan keuangan adalah sebagai berikut :

"Pengolahan data keuangan perusahaan diawali dari bukti-bukti transaksi yang berupa faktur, dokumen, nota, kuitansi dan bukti-bukti transaksi keuangan yang lainnya dan kemudian dicatatkan dalam pembukuan perusahaan sehingga hasil akhir dari proses pencatatan dan pengidentifikasian bukti itu akan akan menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan". Selanjutnya menurut Suwanda (2015) LKPD adalah informasi yang memuat data tentang berbagai unsur struktur kekayaan dan keuangan merupakan cerminan dari hasil suatu kegiatan tertentu

2.2 Kerangka Pemikiran

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Mahmudi (2016) menyatakan instansi pemerintah harus membangun dan memiliki Sistem Pengendalian Internal yang baik. Kualitas laporan keuangan pemerintah dapat menjadi buruk salah satu penyebab utamanya berasal dari lemahnya sistem pengendalian internal. Seperti yang dikemukakan Ahmad et al. (2020) Salah satu yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan tata kelola yang baik dan kualitas informasi laporan keuangan adalah pentingnya pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pelaksanaan aktivitas pelaporan keuangan dalam suatu organisasi. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Botutihe (2013) mengemukakan bahwa keberadaan sebuah sistem akuntansi menjadi sangat penting karena fungsinya dalam menentukan kualitas informasi pada laporan keuangan.

2.3 Hipotesis

- H1: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- H2: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan metode verifikatif, yaitu hasil penelitian kemudian diolah dan diambil kesimpulannya. Dengan menggunakan metode penelitian ini, maka dapat diketahui hubungan antara variabel penelitian dan dapat ditarik kesimpulan yang akan memperjelas gambaran objek penelitian. Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi sasaran untuk mendapatkan suatu data sesuai tujuan dan kegunaan tertentu yang objektif, valid dan realible. Maka objek dalam penelitian ini adalah Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Unit analisis adalah tempat dimana penulis mengumpulkan data dan data tersebut dapat digunakan untuk penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer, agar peneliti dapat mengumpulkan data yang dibutuhkan secara langsung dari objek pertama yang akan diteliti dengan menyebarkan kuesioner. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner dan penelitian kepustakaan.

3.3 Populasi, Sampel, Tempat dan Waktu Penelitian

Populasi merupakan obyek atau subyek yang berada pada satu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Pemilihan jumlah populasi ini dirasakan cukup mewakili untuk memberikan data yang diperlukan dalam penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pegawai pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Pemilihan sampel dengan menggunakan purposive sampling dan dari kriteria yang telah ditetapkan maka sampel dalam penelitian ini adalah pegawai dari bagian akuntansi, anggaran, perbendahara, dan aset dengan jumlah sampel sebanyak 30 sampel. Penulis mengadakan penelitian yang dilakukan di kantor Bupati Kabupaten Bandung Barat. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Februari 2020 sampai dengan Agustus 2020.

3.4 Metode Analisis Data

Analisis data menggunakan alat uji statistik yaitu Model Persamaan (*Strutural Equation Model*- SEM) berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan *Partial Least Square* (PLS). Dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh SPI dan SAKD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan dua pengujian, yaitu uji reliabilitas dan uji validitas.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Tabel 1
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Variabel Sistem
Pengendalian Intern

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%Skor Aktual	Kriteria
1	Lingkungan Pengendalian	193	300	64,3	Cukup Baik
2	Penaksiran Risiko	192	300	64	Cukup Baik
3	Aktivitas Pengendalian	188	300	62,7	Cukup Baik
4	Sistem Informasi dan Komunikasi Akuntansi	188	300	62,7	Cukup Baik
5	Pemantauan	188	300	62,7	Cukup Baik
Total		949	1500	63,3	Cukup Baik

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2020

Tabel 2

**Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah:
Dampak dari Sistem pengendalian Intern dan Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah | Sri Dewi Anggadini, Ari
Bramasto dan Sulton Aulia**

**Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Variabel Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah**

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%Skor Aktual	Kriteria
1	Pencatatan	187	300	62,3	Cukup Baik
2	Pengikhtisaran	193	300	64,3	Cukup Baik
3	Pelaporan	196	300	65,3	Cukup Baik
Total		576	900	64	Cukup Baik

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2020

Tabel 3

**Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Variabel Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah**

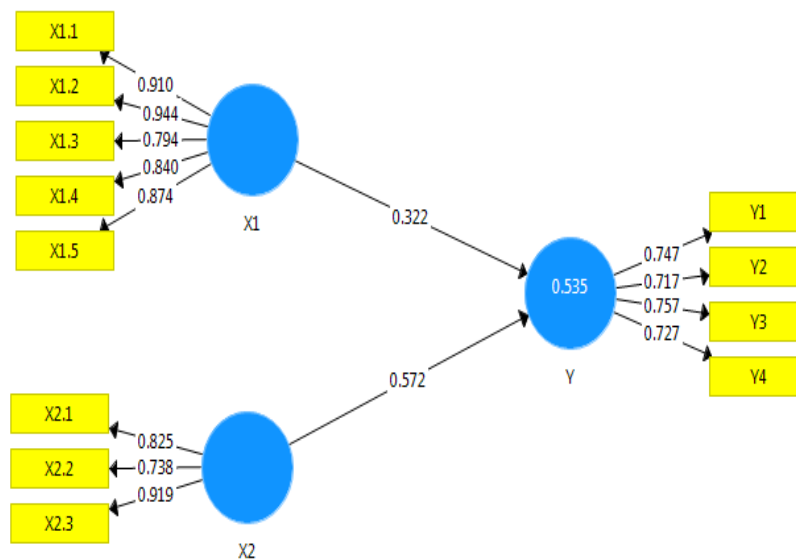
No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%Skor Aktual	Kriteria
1	Relevan	185	300	61,7	Cukup Baik
2	Andal	185	300	61,7	Cukup Baik
3	Dapat Dibandingkan	187	300	62,3	Cukup Baik
4	Dapat Dipahami	196	300	65,3	Cukup Baik
Total		753	1200	62,7	Cukup Baik

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2020

Informasi tabel 1 memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Sistem Pengendalian Intern sebesar 63,3% berada di antara interval 52,01% - 68,00%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern berada dalam kategori cukup baik, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan maka BPKD KBB harus meningkatkan Sistem Pengendalian Intern terutama pada indikator skor terkecil yaitu aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi akuntansi, dan pemantauan. Selanjutnya, hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 64% ada di interval 52,01% - 68,00%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berada dalam kategori cukup baik, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan maka BPKD KBB harus meningkatkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terutama pada indikator skor terendah yaitu pencatatan. Berikutnya, hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 62,7% ada di interval 52,01% - 68,00%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berada dalam kategori cukup baik, hal ini menunjukkan bahwa

masih terdapat kelemahan maka BPKD KBB harus meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terutama pada indikator skor terendah yaitu relevan dan andal.

Pada penelitian ini, terdapat 13 variabel manifes dan 3 variabel laten yakni Sistem Pengendalian Intern (X1) yang dikur dengan 5 variabel manifes, SAKD (X2) dengan 3 variabel manifes dan Kualitas LKPD (Y) dengan 4 variabel manifes. Hasil perhitungan dari keseluruhan model menggunakan SmartPLS 3.0 bisa dilihat pada gambar 1 berikut :



Sumber: Data diolah menggunakan *software Smart PLS*, 2020

Gambar 1
Diagram Jalur Model Lengkap

Tabel 4
Nilai Koefisien Jalur Struktural dan Uji Signifikansi Hipotesis
(Path Coefficients)

	Original Sample (O)	T-Statistik (O /STDEV)
Sistem Pengendalian Intern (X1) → Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,322	2.109
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) → Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,572	4,106

Sumber : Data diolah menggunakan *software Smart PLS*, 2020

Tabel 5

**Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah:
Dampak dari Sistem pengendalian Intern dan Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah | Sri Dewi Anggadini, Ari
Bramasto dan Sulton Aulia**

Analisis Koefisien Determinasi (R²)

	Koefisien Jalur Struktural	Korelasi Dengan Y	Pengaruh (%)
Sistem Pengendalian Intern (X1) → Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,322	0,483	15,55
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) → Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,572	0,663	37,92
Total Pengaruh (R ²)			53,47

Sumber: Data diolah menggunakan *software Smart PLS*, 2020

Tabel 6

Uji t Sistem Pengendalian Intern (X1) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Varia bel Laten	Koefis ien Jalur	t- statis tik	t- kritis	Keteran gan	Kesimp ulan
X1 → Y	0,322	2,109	2,052	Ho ditolak	Signifika n

Sumber : Data diolah menggunakan *software Smart PLS*, 2020

Tabel 7

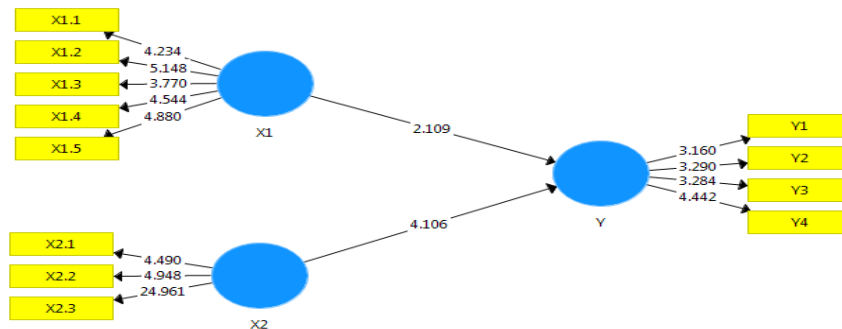
Uji t Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Varia bel Laten	Koefisi en Jalur	t- statis tik	t- kritis	Keteran gan	Kesimp ulan
X2 → Y	0,572	4,106	2,052	Ho ditolak	Signifika n

Sumber : Data diolah menggunakan *software Smart PLS*, 2020

Pada tabel tersebut diperoleh nilai koefisien jalur struktural X1 terhadap Y sebesar 0,322 dan koefisien jalur struktural X2 terhadap Y sebesar 0,572. Maka diperoleh model persamaan struktural sebagai berikut:

$$Y = 0,322X1 + 0,572X2 + \zeta$$



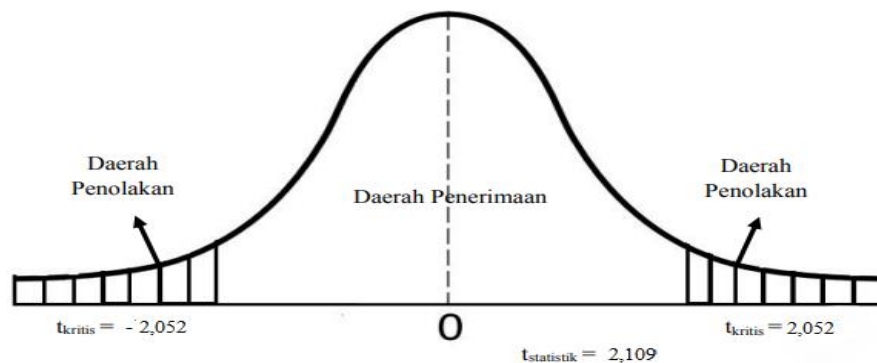
Sumber: Data diolah menggunakan software SmartPLS, 2020

Gambar 2
Nilai Path Coefficient

Dari model struktural pada gambar 2, terlihat bahwa koefisien jalur struktural variabel Sistem Pengendalian Intern (X1) lebih kecil dari variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2). Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern (X1) memiliki pengaruh yang lebih kecil daripada SAKD (X2) terhadap Kualitas LKPD (Y). Berikut ini adalah penjelasan dari tabel 4.30 analisis koefisien determinasi (R²) :

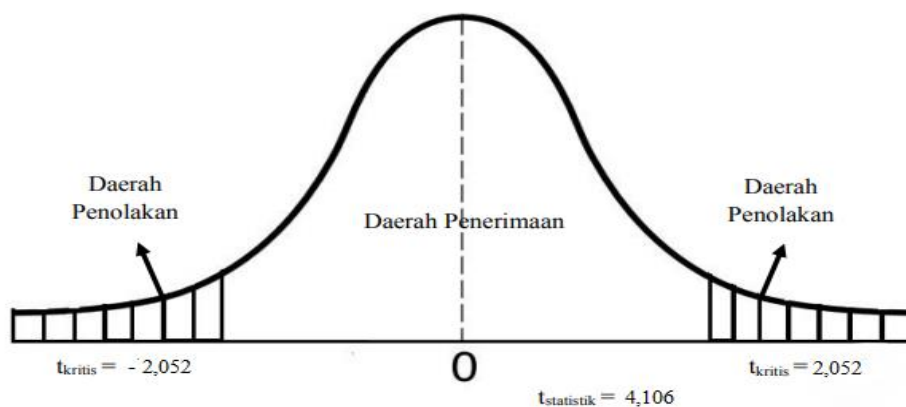
1. Sistem Pengendalian Intern memberikan kontribusi pengaruh sebesar 15,55% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memberikan kontribusi pengaruh sebesar 37,92% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengujian hipotesis bertujuan menguji apakah kedua variabel laten memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak, berikut uraian mengenai pengujian hipotesis penelitian bahwa berdasarkan tabel tersebut nilai t-statistik variabel X1 diperoleh sebesar 2,109. Nilai tersebut lebih besar dari 2,052, sehingga dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan menerima H_a, artinya bahwa Sistem Pengendalian Intern terbukti berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan kontribusi pengaruh sebesar 15,55%. Jika digambarkan, nilai t-statistik dan t-kritis untuk pengujian parsial X1 tampak seperti gambar 3



Gambar 3
Kurva Uji Hipotesis Variabel X1 terhadap Y

Berdasarkan tabel 2, nilai t-statistik variabel X1 diperoleh sebesar 4,106. Nilai tersebut lebih besar dari 2,052, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_a , artinya bahwa Sistem Pengendalian Intern terbukti berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan kontribusi pengaruh sebesar 37,92%. Jika digambarkan, nilai t-statistik dan t-kritis untuk pengujian parsial X1 tampak seperti gambar 3.



Gambar 4
Kurva Uji Hipotesis Variabel X2 terhadap Y

4.2 Pembahasan

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan nilai korelasi sebesar 0,483 yang apabila mengacu pada ketentuan nilai korelasi berada pada kategori sedang atau moderat karena terletak di interval antara 0,400-0,599. Hasil pengujian hipotesis untuk thitung

Kualitas Laporan Keuangan bernilai 2,109 dan t-tabel bernilai 2,052. Dikarenakan t-hitung lebih besar daripada t-tabel ($2,109 > 2,052$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya signifikan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Sistem Pengendalian Intern Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas LKPD pada BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Adapun besarnya pengaruh yang diberikan oleh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu 15,55%, maka semakin bagus SPI yang dijalankan maka akan membuat laporan keuangan makin berkualitas. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian terdahulu Ningtyas et al., (2019) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan diterima. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan nilai korelasi sebesar 0,663 yang mana apabila mengacu pada ketentuan nilai korelasi berada pada kategori kuat karena terletak di interval antara 0,600-0,799. Hasil pengujian hipotesis untuk t-hitung Sistem Akuntansi Keuangan Daerah bernilai 4,106 dan t-tabel bernilai 2,052. Dikarenakan t-hitung lebih besar daripada t-tabel ($4,106 > 2,052$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya berpengaruh signifikan. Hasil penelitian, SAKD berpengaruh terhadap Kualitas LKPD pada BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan besarnya pengaruh yang diberikan yaitu sebesar 37,92%. BPKD KBB harus mengutamakan untuk meningkatkan sistem akuntansi keuangan daerah karena pengaruhnya lebih besar dibandingkan sistem pengendalian intern. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian terdahulu (Bangsa, 2018) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian mengenai pengaruh SPI dan SAKD terhadap kualitas LKPD, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. SPI berpengaruh terhadap kualitas LKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat, artinya semakin baik sistem pengendalian intern maka hal tersebut akan meningkatkan kualitas laporan keuangannya.
2. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat, artinya pengelolaan keuangan daerah yang baik maka hal tersebut akan meningkatkan kualitas laporan keuangannya.

5.2 Saran

Hasil penelitian tentang pengaruh SPI dan SAKD terhadap kualitas LKPD maka penulis memberikan saran, berupa Saran Akademis bahwa untuk pengembangan ilmu akuntansi diharapkan hasil ini dapat dijadikan acuan agar kedepannya peneliti lain dapat menggunakan variabel-variabel yang serupa, metode yang serupa tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda atau mencari variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti kompetensi SDM dan SIA. Penelitian yang dilakukan penulis tentang pengaruh sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan

**Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah:
Dampak dari Sistem pengendalian Intern dan Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah | Sri Dewi Anggadini, Ari
Bramasto dan Sulton Aulia**

daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di BPKD KBB bisa dijadikan sebagai referensi peneliti berikutnya jika dilakukan di tempat yang sama pastikan untuk menggunakan sampel lebih banyak dari penulis agar mengetahui hasil dengan sampel yang berbeda. Peneliti lain bisa meneliti dengan judul yang sama dengan membuktikan di tempat yang berbeda selain di BPKD KBB untuk mengetahui perbedaan besar pengaruhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I., Mahfudnurnajamuddin, ., Mas'ud, M., & Suriyanti, . (2020). Competencies of Apparatus and Internal Control System Effect on The quality of Financial Statement Information and Good Governance. *European Journal of Business and Management Research*, 5(4), 1–6. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.4.425>
- Bangsa, I. N. (2018). The Effect of Internal Control Systems, Accounting Systems on the Quality of Financial Statements Moderated by Organizational Commitments. *Accounting Analysis Journal*, 7(2), 127–134. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v7i2.20616>
- Botutihe, T. H. (2013). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo Tutun*. 53(9), 1689–1699.
- Erlina, Rambe, omar sakti, & Rasdianto. (2015). *Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual*. Salemba empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi sektor publik: akuntansi keuangan daerah* (ed. 4). Salemba empat.
- Jabarexpres. (2018). *Mentok WDP di Akhir Jabatan*. <https://jabarekspres.Com/>. <https://jabarekspres.com/2018/mentok-wdp-di-akhir-jabatan/2/>
- Karmila, Tanjung, A. R., & Darlis, E. (2012). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Riau). *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan*, 9(1), 1–121.
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* (Edisi keti). UPP STIM YKPN.
- Meinarsih, T., Suratman, A., & Hidayati, N. (2020). The Effect of Application of Accrual-Based Government Accounting Standards, Apparatus Quality, Public Accountability and Government Internal Control Systems on Quality of Financial Statements. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 5(8), 452–460. <https://doi.org/10.38124/ijisrt20aug142>
- Ningtyas, H. I. R., Roekhudin, & Andayani, W. (2019). The Effect of Government Internal Control System and Government Accounting System on Performance Accountability With The Financial Quality Statements As Intervening Variables (Case Study: The Government of Lumajang Regency, East Java). *International Journal of Business, Economics and Law*, 18(5), 179–187.
- Nursyabani, F. (2019). *3 Pemda Raih Opini WDP dari BPK, Jabar Siapkan Langkah Strategis*. <https://Ayobandung.Com/>

- <https://ayobandung.com/read/2019/06/20/55624/3-pemda-raih-opini-wdp-dari-bpk-jabar-siapkan-langkah-strategis>
- Puspitawati, L., & Anggadini, S. D. (2011). *Sistem informasi akuntansi*. Graha ilmu.
- Rifad, S. M., Erlina, & Rujiman. (2010). *The Effect Of The Understanding Regional Financial Accounting Systems And Internal Control Systems On Regional Government Organization Performance With A Leadership Style As A Moderating Variable In Indragiri Hulu District Government*.
- Saerang, D. P. E., Wokas, H. R. N., Kumaat, R. J., & Datu, C. (2019). Effect of Understanding Financial Management, Regional Financial Accounting Systems, Effectiveness of Internal Control, and Commitment Towards Financial Performance of North Sulawesi Province. *Accountability*, 8(01), 51. <https://doi.org/10.32400/ja.24282.8.01.2019.51-59>
- Sari, cecep wijaya. (2019). *Ribuan Aset Belum Bersertifikat, Pemkab Bandung Barat Sulit Beroleh WTP*. Pikiran Rakyat. <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-rayar/pr-01308652/ribuan-aset-belum-bersertifikat-pemkab-bandung-barat-sulit-beroleh-wtp>
- Sujana, E., Saputra, K. A. K., & Manurung, D. T. H. (2020). Internal control systems and good village governance to achieve quality village financial reports. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(9), 98–108.
- Suwanda, D. (2015). Factors Affecting Quality of Local Government Financial Statements to Get Unqualified Opinion (WTP) of Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(4), 139–158.
- Synthia. (2017). The Effect of Human Resources Competence and Application of Regional Financial Accounting Systems on Quality of Financial Report. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 2(1), 68–74.
- Wati, K. D., Herawati, N. T., & Sinarwat, N. K. (2014). *Pengaruh Kompetensi Sdm, Penerapan Sap, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. 2.
- Widyaningsih, A. (2016). Internal Control System on the Quality of Financial Statement Information and Financial Accountability in Primary Schools in Bandung , Indonesia. *Research Journal of Finance and Accounting*, 7(10), 10–16.